

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada saat ini pengungkapan *corporate social responsibility* sedang menjadi salah satu topik perbincangan di negara Indonesia, karena semakin tingginya kepedulian masyarakat terhadap tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan, pengungkapan ini terjadi karena, semakin banyaknya masalah yang timbul terkait lingkungan sosial di Indonesia maupun di dunia, seperti kerusakan lingkungan, pencemaran air, udara, angin, dan tenaga kerja yang mengganggu keberlangsungan hidup manusia, (Herdi dan Erinos, 2020). Karena dengan melakukan program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan dapat membangun reputasi yang baik, seperti meningkatnya citra perusahaan. Alasan tersebut membuat perusahaan berlomba-lomba untuk menyajikan dan melaksanakan program-program CSR yang beraneka ragam (Rindawati dan Asyik, 2015).

Karena pada umumnya tujuan di dirikannya sebuah bisnis untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tetapi dengan mengeluarkan biaya sedikit. Dengan demikian, banyak bahaya ataupun kerusakan yang dapat timbul selama perusahaan itu beroperasi, karena tentu akan terjadinya polusi udara, limbah pabrik, limbah sampah plastik, air yang terkontaminasi, dan lainnya. Masyarakat juga berhak mengetahui informasi terkait kegiatan sosial perusahaan, sehingga masyarakat dapat mengetahui kontribusi apa yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan. Banyak perusahaan kini telah

menerapkan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) (Rindawati dan Asyik, 2015). *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) yang merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat yang terdampak secara langsung sebagai bentuk tanggung jawab sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat tersebut dari kualitas hidup yang kurang baik (Darwin, 2006).

Pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) ini telah diatur dalam Undang-Undang RI No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pada Bab I Pasal 1 Ayat 3, menyatakan : Pasal (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pada Bab V Pasal 74, menyatakan :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang memang sudah mengatur peraturan terkait pelaksanaan dan pelaporan CSR, tetapi peraturan tersebut belum memberikan bagaimana pedoman khusus dalam pelaporannya. Selama ini cara pelaporan CSR dan apa yang dilaporkan hanya dilatar belakangi oleh kebutuhan perusahaan dalam bentuk penilaian bagus terhadap perusahaan, bahwa dalam pandangan stakeholder perusahaan memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan sosial dan lingkungan hidup masyarakat (Fatoni *et al.*, 2016).

Fenomena yang terjadi tentang *corporate social responsibility* pada kasus PT. Mayora Indah Tbk beroperasi sejak 1977 di Tangerang. Warga yang tinggal di sekitar PT Mayora Indah Jayanti, produsen makanan dan minuman di Kecamatan Jayanti dan Balaraja, Kabupaten Tangerang mengeluhkan perubahan pada air sumur mereka. "Air sumur berubah warna keruh, kekuningan dan kadang berbau apek," ujar Siti Arnaningsih 30 tahun, warga Kampung Kramat, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti saat ditemui Tempo di rumahnya, Selasa 28 September 2021

Rumah Siti, bersebelahan dengan pabrik makanan dan minuman itu yang hanya dibatasi tembok beton setinggi tiga meter. Menurut Siti, perubahan air sumur di rumah itu terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini atau sejak pabrik itu beroperasi 2017 lalu."Dulu airnya bersih bisa dipakai

minum, kalau sekarang agak ragu untuk diminum karena keruh dan kadang berbau," ujarnya sambil menunjukkan air di dalam ember berwarna putih. "Lihat saja endapan kuning di ember dan kamar mandi." Menurut Siti, jika dipakai mencuci baju putih lama kelamaan baju akan berubah kuning kecoklatan. Karena khawatir air itu berbahaya jika dikonsumsi, Siti dan keluarga terpaksa membeli air mineral untuk kebutuhan minum.

Ahmad Samsuri, 60 tahun, ayah Siti mengatakan telah tiga kali membuat sumur bor dengan kedalaman hingga 40 meter. "Tapi airnya tetap sama, keruh dan berwarna," ucapnya. Keluhan yang sama juga dirasakan warga kampung Gembong Jatake, Desa Gembong, Balaraja. Meski berbeda kecamatan Lokasi kampung Jatake dengan kampung Kramat saling berdekatan hanya dipisahkan oleh saluran irigasi yang juga menjadi saluran pembuangan limbah cair Mayora. "Kalo dulu air sumur di sini jernih, segar seperti air mineral," kata Khadariah, 40 tahun. Namun, kata Khadariah, sejak pabrik itu beroperasi volume air sumur mereka menyusut dan berubah warna. "Keruh dan kekuningan," katanya. Dia mengaku terpaksa membeli air isi ulang untuk kebutuhan makan dan minum.

Lain lagi dengan Husna, 45 tahun yang memutuskan berlangganan air bersih PDAM ketika air sumurnya semakin sedikit dan keruh. Warga kampung yang juga tinggal bersebelahan dengan bangunan pabrik mengaku harus menikmati suara bising mesin pabrik siang dan malam. Mencium bau limbah sudah menjadi kebiasaan mereka sehari-hari. "Kadang menyengat baunya saat lagi makan, langsung hilang nafsu makannya," kata Husna.

Berdasarkan pengamatan Tempo, air limbah pabrik Mayora mengalir melalui saluran irigasi yang melintasi sejumlah kampung hingga bermuara ke Sungai Cidurian. Limbah cair berwarna coklat dan berbusa dibuang melalui gorong-gorong belakang bangunan pabrik yang dibangun di atas lahan seluas puluhan hektare itu. Bau menyengat menusuk hidung tercium ketika berada dekat saluran air berwarna coklat pekat itu.

Manajer Area PT Mayora Indah Jayanti, Mukhlis mengaku belum pernah mendapat laporan keluhan warga soal bau ataupun perubahan warna pada air sumur warga. "Nanti kami cek," ujarnya saat dihubungi, Rabu 29 September 2021. Mukhlis memastikan limbah cair pabrik yang dibuang ke saluran pembuangan sudah melalui proses pengolahan limbah. "Kami pastikan limbah kami adalah limbah organik karena berasal dari bahan makanan dan tidak mengandung racun," ucapnya. Dia membantah jika limbah berbau menyengat. "Bau mungkin bukan dari limbah kami."

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang Ahmad Taufik mengatakan telah menerima laporan warga terkait dugaan pencemaran limbah pabrik Mayora pada empat bulan lalu dan satu bulan lalu. "Meliputi masalah pembuangan limbah, bau dan air sumur," kata Taufik. DLH, kata Taufik telah memberikan teguran kepada Mayora dan meminta memperbaiki IPAL dan saluran pembuangan limbah. "Sekarang masih terus kami awasi dan pantau."

Sementara itu Kepala Desa Gembong, Nurjen, mengatakan akan menguji air sumur warga yang tinggal di sekitar pabrik Mayora Indah Jayanti. Namun, Pemerintah Desa Gembong, Kabupaten Tangerang pernah

mendapatkan laporan dari warga seputar pembuangan limbah pabrik itu yang berdampak pada area persawahan, bau menyengat. "Kalau bau saya juga menciumnya, sangat menyengat, apalagi saluran pembuangan limbahnya persis lewat depan rumah saya," kata Nurjen. Nurjen memastikan saat ini hanya pabrik Mayora, industri yang beroperasi di desa Gembong. "Cuma Mayora yang lain tidak ada," katanya. Menurut Nurjen, dari puluhan hektar kawasan pabrik itu sebagian besar masuk ke wilayah desa Gembong. Menurut Nurjen, saluran pembuangan limbah pabrik Mayora sepanjang 1,5 kilometer melewati desa Gembong. "Ada dua kampung yang dihuni 300 kepala keluarga," ucapnya. Dia mengakui jika selama ini warga desanya sama sekali tidak menerima dana kompensasi dari perusahaan itu. "Selama ini hanya ada CSR seperti bedah rumah 1 unit, pengadaan tempat cuci tangan." (Tempo Metro, 2021).

Kasus yang terjadi diatas dapat kita ambil kesimpulan, bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan harus diatur secara tertata dan terprogram dengan baik oleh perusahaan, agar tidak menimbulkan efek negatif bagi perusahaan, serta merugikan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan bagi masyarakat yang tempat tinggalnya berlokasi didekat perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan sudah seharusnya menerapkan pengungkapan terkait *corporate social responsibility* agar perusahaan mendapatkan kepercayaan dari pihak pemerintah maupun dari masyarakat setempat, karena pengungkapan tersebut penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait pengungkapan *corporate social responsibility*.

Ada beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Faktor pertama yang mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* adalah Kepemilikan saham publik. Kepemilikan saham publik adalah suatu proporsi kepemilikan saham yang dimiliki masyarakat atas saham perusahaan (Hamdani, *et al.*, 2017:47). Pengertian publik disini adalah masyarakat atau pihak luar diluar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham publik, semakin banyak pihak-pihak yang membutuhkan informasi didalam laporan perusahaan, dengan begitu akan semakin banyak point-point yang harus dilaporkan dalam laporan tahunan, dengan begitu investor ingin mendapatkan informasi terkait point-point apa saja yang dilaporkan di laporan tahunan tentang tempat investasinya dan mampu mengawasi kegiatan manajemen, sehingga kepentingan perusahaan mampu terpenuhi (Sriayu dan Mimba., 2013)

Perusahaan yang sahamnya banyak dimiliki oleh publik menunjukkan indikator bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dengan begitu mampu memberikan deviden yang layak dan mampu untuk terus beroperasi, sehingga sangat berpeluang untuk melakukan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan perusahaan agar nantinya seluruh masyarakat mengetahui dan mampu meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perusahaan, dengan begitu perusahaan diharapkan mampu untuk mengungkapkan informasi yang lebih banyak (Badjuri, 2011).

Penelitian terdahulu dengan menggunakan kepemilikan saham publik menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Basar dan Nurdiana (2020), Rahayu dan Indah (2015), Pramesti dan Budiasih (2020), serta Hamdani *et al* (2017) menunjukkan hasil bahwa Kepemilikan Saham Publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Sedangkan penelitian Indraswari dan Astika (2015), Oktariani (2013), Abbas *et al* (2019), serta Rindawati dan Asyik (2015) menunjukkan hasil bahwa Kepemilikan Saham Publik berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Penelitian Permatasari dan Widyastuti (2019) memperoleh hasil yang kontradiktif yang menyatakan bahwa Kepemilikan Saham Publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Santoso, *et al.*, (2017), serta Agustiani dan Brahmayanti (2019) juga menyatakan bahwa Kepemilikan Saham Publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Faktor selanjutnya adalah Profitabilitas. Profitabilitas merupakan alat ukur yang digunakan oleh perusahaan untuk menganalisis kinerja manajemen, tingkat profitabilitas akan menggambarkan seberapa besar porsi laba perusahaan (Lamia dan Anisma, 2014). Perusahaan memiliki kemampuan dalam kinerja keuangan yang baik, pasti memiliki upaya untuk melakukan pengungkapan CSR yang luas, (Amalia, 2013). Sehingga, perusahaan yang memiliki kinerja yang tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan dengan cara melakukan pengungkapan yang luas untuk membentuk *image* yang berpengaruh terhadap kepercayaan *stakeholders*, (Permatasari dan Widyawati,

2019). Hal yang mendasarinya adalah karena pengungkapan *Corporate Social Responsibility* merupakan sebuah kegiatan yang memerlukan pengeluaran biaya sehingga jika perusahaan lebih *profitable*, sehingga perusahaan akan melaksanakan program CSR yang lebih besar ( Abbas *et al.*, 2019 ).

Penelitian terdahulu dengan menggunakan profitabilitas menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Indraswari dan Astika (2015), Oktariani (2013), Abbas *et al* (2019), Permatasari dan Widayawati (2019), Rindawati dan Asyik (2015), serta Hamdani *et al* (2017), menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Sedangkan pada penelitian Mutia (2011), Pajaria (2016) dan Herdi dan Erinos (2020) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Faktor selanjutnya adalah *Leverage*. *Leverage* adalah perbandingan antara dana yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dengan dana yang dimiliki oleh pihak perusahaan, dengan begitu *leverage* memberikan gambaran terkait struktur modal yang dimiliki perusahaan ( Abbas *et al.*, 2019 ). *Leverage* merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan memiliki tingkat resiko hutang tak tertagihnya pada kreditur yang nantinya akan digunakan dalam membiayai aset perusahaan ( Herdi dan Erinos, 2020 ). Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi memiliki kemungkinan yang tinggi untuk melakukan pinjaman diluar dengan menggunakan asetnya, sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang rendah lebih sedikit kemungkinan untuk membiayai menggunakan

modal sendiri, (Trinanda *et al.*, 2018 ). Perusahaan yang memiliki rasio *leverage* tinggi, akan lebih sedikit ketika mengungkapkan informasi terkait *corporate social responsibility* ( Putri, 2017 ).

Penelitian terdahulu dengan menggunakan *leverage* menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Rofiqoh dan Priyadi (2016), Wahyuningsih dan Mahdar (2019), dan Yanti *et al* (2021) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Penelitian Herdi dan Erinos (2020), Miftah dan Arifin (2013) dan penelitian Rindawati dan Asyik (2015) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hasil yang berbeda didapat dari penelitian Santioso dan Chandra (2012), Putri dan Christiawan (2014), dan Abbas (2019) yang menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Faktor selanjutnya adalah Dewan Komisaris Independen. Dewan Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi langsung dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris lainnya, dan para pemegang saham pengendali dan bebas dari hubungan bisnis yang terkait dengan perseroan, sehingga mempengaruhi dalam melakukan tindakan yang independen (Asiah dan Muniruddin, 2018). Dewan komisaris independen yang netral yang tidak terpengaruh oleh campur tangan dari pihak manajemen, dengan begitu dewan komisaris independen akan akan melindungi kepentingan para *stakeholder* dalam perusahaan untuk melaksanakan *corporate social responsibility* dan pengungkapannya

(Nugroho dan Yulianto, 2015). Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris independen sehingga dalam mengungkapkan *corporate social responsibility* akan semakin besar ( Noviani *et al.*, 2017 ).

Penelitian terdahulu dengan menggunakan komisaris independen mendapatkan hasil beragam. Penelitian Nur dan Priantinah (2012), Sari dan Lian Permata (2014), Asiah dan Muniruddin (2018), menunjukkan hasil bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Penelitian Noviani *et al* (2017), Santioso dan Chandra (2012), Surdana dan Arlindania (2011), dan Jo dan Maretno (2011) menunjukkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Sedangkan pada penelitian Nugroho dan Yulianto (2015), Ramdhaningsih dan Utama (2013), Anggraeni, novita (2020), Herdi dan Erinos (2020) menunjukkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Penelitian ini mengembangkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Herdi dan Erinos, 2020) yang meneliti tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan komposisi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* yang ada pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu adalah, menambah variabel kepemilikan saham publik. Objek dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman.

Periode yang digunakan pada penelitian ini yaitu ( 2017-2020 ) berbeda dari penelitian sebelumnya yang menggunakan periode ( 2014-2018 ).

Penelitian ini menambahkan variabel kepemilikan publik, karena kepemilikan saham publik memiliki pengaruh yang positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Perusahaan yang memiliki porsi kepemilikan saham publik yang lebih tinggi, cenderung akan melaporkan lebih banyak informasi terkait tanggung jawab sosial (CSR) yang dilakukan, karena dinilai memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat (Pramesti dan Budiasih, 2020).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Apakah Kepemilikan Saham Publik berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ?
- b. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ?
- c. Apakah *Leverage* berpengaruh negatif terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ?
- d. Apakah Komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ?

### **C. Pembatasan Masalah**

Untuk membatasi pembahasan ruang lingkup permasalahan penelitian, maka dibuatkan batasan masalah, agar penelitian ini menjadi lebih terfokus dan terarah sehingga diberi batasan masalah sebagai berikut :

1. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah kepemilikan saham publik, profitabilitas, *leverage*, dan komposisi dewan komisaris independen dan *Corporate Social Responsibility*.
2. Data penelitian ini diambil dalam laporan tahunan perusahaan makanan dan minuman yang terdapat pada website resmi perusahaan dan [www.idx.com](http://www.idx.com)
3. Sample penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberi bukti empiris Pengaruh positif Kepemilikan Saham Publik terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
2. Memberi bukti empiris pengaruh positif Profitabilitas terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
3. Memberi bukti empiris pengaruh positif *Leverage* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

4. Memberi bukti empiris pengaruh positif Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

## 2. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sebagai proses pembelajaran dan meningkatkan wawasan serta dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pengaruh kepemilikan saham publik, profitabilitas, leverage, komposisi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi dalam menentukan kebijakan yang akan diambil.

#### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan bahan pertimbangan pemerintah agar lebih memperhatikan hal-hal yang berkenaan tentang tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat berjalan secara selaras dengan kelestarian lingkungan. Agar Pemerintah dapat mencapai tujuannya serta mampu

mewujudkan tuntunan kepercayaan masyarakat, karena pada umumnya perusahaan akan meminta izin untuk beroperasi kepada pihak pemerintah, sehingga pemerintahlah yang nantinya membuat para masyarakat sekitar perusahaan menjadi percaya, bahwa perusahaan tersebut sudah layak beroperasi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengawasi kegiatan operasional perusahaan yang dapat mempengaruhi lingkungan dan sosial.

